

EVALUASI SMKN UNGGUL TERPADU ANAK TUHA PROVINSI LAMPUNG

EVALUATION OF SMKN UNGGUL TERPADU ANAK TUHA IN LAMPUNG PROVINCE

Ridwan Saifuddin¹, Elip Heldan², Zainal Mutaqim³, Ika Tri Wulan⁴

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung¹

E-mail: bumikitasatu@gmail.com

Dikirim 25 Juli 2018 Direvisi 09 November 2018 Disetujui 18 November 2018

Abstrak: Kebijakan pendirian SMKN Unggul Terpadu Anak Tuha oleh Pemerintah Provinsi Lampung merupakan wujud komitmen pembangunan pendidikan di daerah. Kebijakan ini perlu ditindaklanjuti secara baik, agar tujuan awal pendirian sekolah vokasi tersebut dapat terwujud. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kondisi eksisting, proses pembelajaran, serta capaian proses pendidikan di sekolah tersebut. Kajian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil evaluasi menunjukkan Pemerintah Provinsi perlu memperkuat kebijakan sumber daya manusia terutama penyediaan guru dan tenaga kependidikan yang mumpuni; seleksi dan pengangkatan kepala sekolah; penguatan manajemen sekolah dengan mengoptimalkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME); penataan manajemen keuangan; dukungan sarana-prasarana praktik dan laboratorium; serta mendorong pemecahan status lahan yang masih menyatu dengan BPPT.

Kata kunci: Evaluasi, Kebijakan, SMK, Pemerintah, Lampung.

Abstract: *The policy of the establishment of SMKN Unggul Terpadu by the Provincial Government of Lampung is a form of commitment to education development in the region. This policy needs to be followed up properly, so that the initial purpose of establishing the vocational school can be realized. Evaluation is done to know the existing condition, learning process, and educational process achievement in school. This study was conducted with qualitative approach with descriptive method. Evaluation results indicate Provincial Governments need to strengthen human resource policies, especially the provision of qualified teachers and education personnel; selection and appointment of school principals; strengthening school management by optimizing the Internal Quality Assurance System (SPMI) and the External Quality Assurance System (SPME); arrangement of financial management; support of practical facilities and laboratories; and encourage the splitting of land status that is still integrated with BPPT.*

Keywords : *Evaluation, Policy, Vocational School, Government, Lampung.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada 2011, Pemerintah Provinsi Lampung menginisiasi pembangunan kawasan pendidikan di atas lahan seluas kurang lebih seratus hektar di Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah. Rencananya, di kawasan tersebut akan didirikan SD, SMP, SMA, SMK, dan Politeknik, serta didukung sarana penunjang seperti asrama siswa, gedung serba guna, *medical center*, masjid, *guest house*, termasuk area perkebunan percontohan dan sarana penunjang lainnya.

Diantara rencana pembangunan kawasan pendidikan strategis tersebut, hingga saat ini yang sudah dibangun adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Unggul Terpadu (SMKN UT) Anak Tuha, dengan sarana penunjang berupa asrama siswa, perumahan guru, serta sarana lainnya, dalam satu pengelolaan SMKN UT. Menyusul kemudian, pada 2015, telah ditandatangani pula kesepakatan antara tiga pihak, yaitu Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dan Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi

(BPPT) untuk pengembangan *Techno Park*, di kawasan tersebut.

Dalam Nota Kesepahaman antara tiga pihak tentang Pengembangan *Techno Park* Lampung Tengah, yang ditandatangani pada 28 April 2015 di Gedung BPPT Jakarta, disepakati untuk memanfaatkan aset bersama dan saling mendukung dalam pengembangan *Techno Park* tersebut, sebagai pusat pengembangan daya saing teknologi industri unggulan daerah, antara lain ubi kayu, padi, peternakan sapi, serta pakan. Tujuan Nota Kesepahaman itu adalah untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi daerah serta meningkatkan kapasitas masyarakat dan lembaga-lembaga daerah melalui pengembangan *Techno Park*, untuk mendukung pembangunan daerah Lampung Tengah. Sedangkan maksudnya adalah untuk menciptakan lingkungan kondusif bagi kolaborasi antara komunitas akademis, bisnis, pemerintah, dan menumbuhkan bisnis yang berbasis inovasi dan meningkatkan daya saing kawasan.

Pendirian SMKN Unggul Terpadu di Kecamatan Anak Tuha itu sendiri juga merupakan bagian dari hasil kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Lampung, BPPT, serta pemerintah kabupaten dan kota. Pendirian SMK dengan program keahlian Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian dan Teknik Energi Biomassa itu dilatarbelakangi ancaman krisis energi global, seiring menipisnya cadangan sumber energi fosil, sehingga kebutuhan pengembangan alternatif sumber energi baru dan terbarukan (*bioenergy*) dirasakan semakin mendesak.

Angkatan pertama SMKN UT Anak Tuha mulai menerima peserta didik baru pada tahun ajaran 2011/2012, dan siap menampung 50 alumni SMP dari kabupaten/kota se-Provinsi Lampung yang berprestasi, dengan biaya pendidikan dari pemerintah kabupaten/kota setempat (beasiswa). Namun, peserta didik angkatan pertama hanya 47 orang atau tidak

memenuhi kuota. Proses pendidikannya menerapkan sistem *boardin school*, dimana peserta didik semua tinggal di asrama sekolah.

Saat ini, jumlah total siswa SMKN UT sebanyak 150 siswa kelas 10, 11, dan 12. Alumni pertama SMKN UT tersebut kini sudah tersebar di perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Sebagian diantaranya langsung diterima kerja, baik di perusahaan dalam provinsi maupun luar daerah. Pengelola SMKN UT juga telah membangun kesepahaman (MoU) dengan dunia usaha dan industri, antara lain, B2TP-BPPT, Simpang Pematang Mulia, PT. Celeste Bakery Metro, Quick Tractor.

Dalam perjalanannya, SMKN UT yang diharapkan menjadi pusat keunggulan (*center of excellence*) pendidikan kejuruan yang mampu menjawab kebutuhan alternatif sumber energi baru dan terbarukan, ternyata sampai hari ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Rencana pembangunan kawasan pendidikan terpadu di sana—mulai jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi—juga tidak berlanjut. Bahkan aset yang sudah ada berupa gedung dan lahan yang cukup besar, tidak semua dapat dimanfaatkan secara baik, diantaranya bahkan rusak karena minimnya perawatan.

Penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di SMKN UT Anak Tuha juga menghadapi berbagai permasalahan. Diantaranya, permasalahan hak kepemilikan atau status lahan yang belum tuntas, karena sertifikat tanah masih menginduk dalam sertifikat lahan milik BPPT. Tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan di sana juga semua masih berstatus honor murni dengan Surat Keputusan (SK) dari kepala sekolah, hanya ada satu PNS yaitu kepala sekolah sendiri. Akses jalan dari dan ke SMKN UT Anak Tuha yang berstatus jalan kabupaten, juga rusak sepanjang tahun tanpa perbaikan yang berarti hingga survei penelitian ini dilakukan. Akibatnya, guru dan tenaga kependidikan yang tinggal jauh dari lokasi

SMKN UT, setiap hari merasakan “penderitaan” karena harus melewati jalan yang kondisinya sangat tidak layak itu.

Kondisi ironis sekolah dengan predikat “unggul terpadu,” yang diharapkan bisa menjadi unggulan Provinsi Lampung tersebut, memerlukan evaluasi mendalam untuk pengambilan kebijakan menyikapi kondisi yang ada. Peranan evaluasi ini sangat penting dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan upaya peningkatan kualitas pendidikan di Lampung. Dengan evaluasi, akan diketahui apakah tujuan pendirian SMKN UT sudah tercapai sesuai harapan atau sebaliknya, serta faktor apa saja yang memengaruhi secara positif maupun negatif terhadap upaya pencapaian tujuan pendiriannya. Faktor positif tentu harus dipertahankan dan ditingkatkan, sedangkan faktor negatif yang menghambat pencapaian tujuan untuk dapat diatasi.

B. Rumusan Masalah

Penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di SMKN Unggul Terpadu Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, yang telah berlangsung sejak 2011, dinilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh, terkait pencapaian tujuan awal pendirian sekolah unggul terpadu tersebut. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi eksisting sekolah, serta relevansi penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran terhadap tujuan pendirian sekolah tersebut hingga saat ini.

Penelitian ini akan mendalami proses penyelenggaraan pendidikan di SMKN Unggul Terpadu di Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah, dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian (*research question*) sebagai berikut:

1. Bagaimana relevansi penyelenggaraan pendidikan di SMKN Unggul Terpadu Anak Tuha terhadap tujuan awal pendirian sekolah tersebut?
2. Apakah proses penyelenggaraan pendidikan di SMKN Unggul Terpadu

Anak Tuha telah berjalan sesuai dengan arah tujuan yang ditetapkan? Kendala apa yang dihadapi?

3. Kebijakan apa yang sebaiknya diambil oleh Pemerintah Provinsi Lampung terkait keberlanjutan satuan pendidikan tersebut?

METODOLOGI

A. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif (kualitatif deskriptif). Desain penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan dan mendeskripsikan kondisi nyata satuan pendidikan dan proses pendidikan eksisting di sekolah, kendala-kendala yang dihadapi dalam manajemen sekolah dan proses pembelajaran, serta hasil yang telah dicapai.

Pengumpulan data dilakukan secara langsung (data primer) melalui observasi, interview, serta diskusi kelompok terfokus (FGD) yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal sekolah. Pemangku kepentingan internal sekolah terdiri dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan Komite Sekolah. Sedangkan pemangku kepentingan eksternal terdiri dari alumni SMKN UT, Dewan Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah, dan B2TP-BPPT. Sebelumnya kajian dilakukan, juga telah dilakukan diskusi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung serta Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Bidang Pendidikan terkait kondisi SMKN UT. Pengamatan langsung (observasi) ke lingkungan satuan pendidikan juga dilakukan dalam rangka kajian ini.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari penelitian ini adalah dalam rangka mencari jawaban atas pertanyaan penelitian, antara lain:

1. Mengetahui penyelenggaraan proses pendidikan SMKN Unggul Terpadu Anak Tuha serta kondisi lingkungan pembelajaran.
2. Mengetahui capaian proses pendidikan SMKN Unggul Terpadu Anak Tuha, kaitannya dengan tujuan awal pendirian sekolah tersebut, sekaligus identifikasi kendala-kendala yang dihadapi pengelola sekolah.
3. Menyusun rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Provinsi Lampung terkait keberlanjutan SMKN Unggul Terpadu Anak Tuha.

Adapun sasaran dari kegiatan penelitian ini adalah tersedianya kajian ilmiah sebagai landasan dalam rangka melihat dan mengevaluasi SMKN Unggul Terpadu di Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, sekaligus menjadi salah satu sumber masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan pengembangan satuan pendidikan tersebut.

PENGELOLAAN SATUAN PENDIDIKAN

A. *Sejarah SMKN UT*

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Unggul Terpadu di Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah ini, berdiri berdasar Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/675/III.01/HK/2011 tentang Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK) Unggul dan Terpadu Bertaraf Internasional Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung, yang ditandatangani oleh Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. pada 19 November 2011.

Kemudian, pada 4 Februari 2014, terbit Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 63/KPTS/D.1/2014 tentang Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Unggul Terpadu Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah. Dengan dua

keputusan tersebut, status SMKN UT yang berada dalam binaan Pemerintah Provinsi Lampung, juga menjadi tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah juga untuk pembinaan dan pengembangan fungsi sekolah tersebut.

SMKN UT mulai menerima peserta didik pada tahun pelajaran 2011/2012, dengan program keahlian Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian dan Teknologi Bio Energi. Peserta didik (*input*) SMKN UT berasal dari utusan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung yang dinilai berprestasi. Angkatan pertama, sekolah ini menerima 47 peserta didik. Karena pembangunan asrama siswa pada saat penerimaan angkatan pertama masih dalam proses pembangunan, sebanyak 47 peserta didik angkatan pertama terpaksa harus dipondokkan sementara di rumah penduduk tak jauh dari lokasi SMKN UT.

Baru pada 2013, peserta didik tersebut bisa menempati asrama siswa SMKN UT yang telah selesai dibangun. Kerja sama SMKN UT dengan Balai Besar Teknologi Pati (B2TP-BPPT) yang telah dijalin berdasarkan MoU antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan BPPT, telah terlaksana sejak 2012, antara lain, dengan mendatangkan tenaga pendidik dari B2TP selain penyediaan tempat praktek (magang) bagi peserta didik SMKN UT.

Sekolah ini pada awal berdiri dipimpin Kepala Sekolah A. Helmi, M.M.. Sebagai kepala sekolah pertama, beberapa prestasi berhasil diraih. Pada 2013, SMKN UT meluluskan angkatan pertama, dengan UN tertinggi seluruh SMK se-Provinsi Lampung. Alumninya berhasil diterima di Universitas Lampung (Unila) dan Institut Teknologi Sumatera (Itera) tanpa tes, dan berhasil meraih Indeks Prestasi tinggi dalam perkuliahan. Prestasi lain pada tingkat Provinsi Lampung selama masa kepemimpinan pertama ini. Selain itu, prestasi dalam berbagai lomba juga berhasil diraih untuk tingkat Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2013.

Pada Tahun Ajaran 2013/2014, terjadi pergantian Kepala Sekolah SMKN UT, dari A. Helmi, M.M. kepada Drs. Jayani, M.Pd.. Dalam masa kepemimpinan kedua Kepala Sekolah Jayani ini, SMKN UT melaksanakan spektrum baru Teknologi Energi Terbarukan, dengan paket keahlian Teknik Energi Biomassa (TEB) dan program keahlian Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian (TPHP). Dua program keahlian yang dimiliki SMKN UT ini kemudian mendapatkan nilai Akreditasi B, tepatnya sejak 17 Oktober 2015 hingga 2020. Pada masa kepemimpinan kedua inilah beberapa prestasi berhasil diraih pada tingkat Kabupaten dan Provinsi Lampung.

Pada tahun 2017, seorang siswa SMKN UT juga berhasil lolos seleksi Paskibraka Lampung Tengah. Kemudian, pada periode 2016-2017, SMKN UT meluluskan peserta didiknya dengan nilai UN termasuk dalam sepuluh tertinggi se-Kabupaten Lampung Tengah.

Pada Mei 2017, SMKN UT kembali mengalami regenerasi kepemimpinan, dengan kepala sekolah baru, yaitu Made Supiase, S.Pd.T. sebagai kepala sekolah yang ketiga. Pada masa kepemimpinannya ini, Program Keahlian Teknik Energi Terbarukan Terakreditasi B pada tanggal 30 November 2017 berlaku hingga 30 November 2022.

Pada Tahun Ajaran baru 2018/2019, SMKN Unggul Terpadu membuka jurusan baru, yaitu Agribisnis Ternak Ruminansia dan Teknik Kendaraan Ringan (otomotif). Dalam perkembangannya, sekolah ini memiliki pertanian dan keunggulan pengolahan lingkungan sekolah dan asrama. Pada Tahun Ajaran 2017/2018, SMKN Unggul Terpadu meluluskan siswa 10 besar terbaik se-Kabupaten Lampung Tengah.

Dalam masa kepemimpinan Made Supiase ini, SMKN UT menghidupkan lagi ekstrakurikuler Marching Band, yang telah lama vakum sejak 2013. Kegiatan

kembali kegiatan olah raga di asrama dan sekolah melalui perbaikan lapangan futsal dan lapangan basket serta menyusul lapangan voli dan sepak bola, juga dilakukan. Selain itu, mengikuti pameran Produk Kejuruan di beberapa even pameran pada tingkat Provinsi Lampung. Pada 2018, peserta didik SMKN UT kembali berhasil lolos seleksi Paskibraka Lampung Tengah sebanyak dua siswa.

Segala upaya pembenahan struktur dan infrastruktur sekolah mulai dilakukan kembali, dimana SMKN UT mendapat Bantuan Rehabilitasi Lokal Kelas tahun 2018. Adapun MoU telah dilakukan antar SMKN Unggul Terpadu dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), antara lain, dengan B2TP-BPPT Lampung Tengah dan Sinar Pematang Mulia II Lampung Tengah. Peran aktif Bursa Kerja Khusus SMKN Unggul Terpadu berkoordinasi dengan BKK Lampung Tengah untuk menyalurkan lulusan dari sekolah ini.

Dengan pembukaan dua jurusan baru pada tahun ajaran 2018/2019, persiapan dilakukan dengan melengkapi peralatan yang lebih memadai untuk kegiatan belajar mengajar siswa. Peningkatan fungsi lahan tidur untuk muatan lokal (mulok) pertanian, dengan memanfaatkan lahan di sekitar sekolah sebagai penunjang kegiatan siswa, serta pelayanan masyarakat sekitar melalui pembagian bibit tanaman secara gratis kepada warga yang tinggal di sekitar sekolah.

B. *Pengelolaan Satuan Pendidikan*

Setiap satuan pendidikan dikelola berdasarkan perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, serta sistem informasi manajemen. Setiap sekolah mengembangkan perencanaan program, mulai penetapan visi, misi, tujuan, dan rencana kerja. Pelaksanaan rencana kerja sekolah harus didasarkan pada struktur organisasi dan pedoman pengelolaan secara tertulis, yang meliputi bidang kesiswaan, kurikulum dan kegiatan

pembelajaran, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, keuangan, serta pembiayaan. Pengelolaan sekolah juga hendaknya mempertimbangkan budaya dan lingkungan sekolah, serta melibatkan peran serta masyarakat sekitar.

Pengelolaan setiap satuan pendidikan tentu diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Karena itu, penting dalam konteks ini hadirnya kepemimpinan yang mampu melahirkan keputusan yang efektif dalam upaya mencapai tujuan, didukung manajemen yang bisa berjalan secara optimal sesuai aturan penyelenggaraan sekolah. Kepemimpinan sekolah terdiri dari kepala sekolah yang memenuhi persyaratan, minimal memiliki satu wakil kepala sekolah yang dipilih secara demokratis, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah memiliki kemampuan memimpin (pengetahuan, keterampilan, dan perilaku), juga tentunya ada pendelegasian tugas dan wewenang yang efektif kepada semua jajaran struktur organisasi satuan pendidikan. Kepemimpinan sekolah juga mencakup kepemimpinan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Guru adalah pemimpin dalam proses pembelajaran di kelas.

Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang telah diubah dengan PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, bahwa setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional. Lingkup Standar Nasional Pendidikan (SNP), meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, serta standar penilaian pendidikan. Kedelapan standar tersebut dinilai setiap tahun oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/

Madrasah, yang di tingkat provinsi dilaksanakan Badan Akreditasi Provinsi.

C. *Evaluasi Satuan Pendidikan*

Dalam Undang-Undang Sisdiknas disebutkan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dalam rangka mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Sistem pendidikan nasional merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Di dalamnya, berlangsung proses pembelajaran, yaitu interaksi antara peserta didik dengan pendidik (guru), didukung media dan sumber belajar yang cukup pada suatu lingkungan belajar yang kondusif. Evaluasi pendidikan merupakan kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Masyarakat dapat berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.

Evaluasi terhadap satuan pendidikan merupakan satu kebutuhan, untuk mendapatkan gambaran nyata proses pendidikan yang berlangsung di satuan pendidikan. Bagaimana kegiatan dan strategi belajar mengajar yang dilakukan dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan dalam satuan pendidikan bersangkutan. Evaluasi satuan pendidikan, selain untuk mengetahui kondisi eksisting penyelenggaraan pembelajaran, juga untuk mengetahui apakah tujuan dan rencana yang telah ditetapkan dapat berjalan dan telah mencapai sasaran sesuai dengan

harapan. Evaluasi juga dilakukan untuk mengetahui manfaat dari kebijakan dan program yang telah diterapkan di satuan pendidikan, baik dalam skala kecil di satuan pendidikan itu sendiri maupun skala yang lebih luas, daerah atau nasional. Pada akhirnya, evaluasi juga bermanfaat untuk menentukan apakah kebijakan dan program yang telah ada pada satuan pendidikan akan diteruskan, diperbaiki, ditingkatkan atau diperluas, dimodifikasi, atau akan dihentikan.

D. Kondisi Ekisting Sekolah

Lokasi pembangunan SMKN UT yang bersebelahan dengan B2TP-BPPT ini bukan sebuah kebetulan. Selain faktor ketersediaan lahan, B2TP-BPPT yang dibentuk sebagai pusat unggulan teknologi diversifikasi sumber daya pati, disiapkan untuk mengembangkan teknologi industri dibidang etanol dan derivatnya secara tepat guna, memiliki keterkaitan dan sejalan dengan misi pembangunan SMKN UT, yaitu mengembangkan alternatif sumber energi baru dan terbarukan. Di areal kawasan yang sama juga telah dicanangkan untuk pembangunan *Techno Park* Lampung Tengah, berdasarkan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, yang ditandatangani pada 28 April 2015 di Gedung BPPT, Jakarta.

Lokasi SMKN UT memang relatif jauh dari pusat kota Kabupaten Lampung Tengah, apalagi dari ibu kota Provinsi Lampung. Kondisi infrastruktur jalan yang buruk untuk akses ke sekolah tersebut, menyebabkan waktu tempuh ke sana menjadi relatif lama. Jarak tempuh dari Bandar Lampung yang hanya sekitar 65 kilo meter, harus ditempuh dalam waktu lebih dari dua jam menggunakan mobil mini bus, karena kondisi jalan di beberapa bagian banyak yang rusak dan berlubang cukup parah.

Beberapa bangunan besar yang sudah berdiri di sana, juga tampak tidak

termanfaatkan dan tidak terawat. Diantaranya bangunan masjid, gedung serba guna, serta beberapa gedung lain yang juga masih dikelilingi rumput dan semak tinggi. Pada bagian tengah-tengah areal sekolah, dan juga di sekeliling kawasan, terlihat lahan cukup luas yang ditanami singkong oleh warga sekitar, disamping juga terdapat kolam (embung) yang dimanfaatkan untuk memelihara ikan.

Sebenarnya fasilitas prasarana dan sarana pendidikan di sekolah tersebut terbilang lengkap. Terdapat gedung kantor kepala sekolah yang cukup luas sebagai pusat pengelolaan satuan pendidikan, ruang kelas, gedung laboratorium, gedung perustakaan, gedung workshop, dan parasarana pendidikan lain termasuk lapangan olah raga. Selain itu, SMK UT juga dilengkapi fasilitas untuk menunjang sistem *boarding school* yang diterapkan di sekolah tersebut, seperti 9 asrama guru, 7 asrama putri, 7 asrama putra, kantin/ruang makan yang cukup besar, dan juga pos satpam.

Namun, tidak semua gedung yang dipergunakan dalam proses pendidikan tersebut dalam kondisi baik dan terawat. Plafon gedung perpustakaan yang terbuat dari gypsum, terlihat ambrol sebagian. Juga plafon ruang makan tampak berlubang cukup lebar. Plafon ambrol ini sudah sering terjadi. Setiap tahun, setiap pergantian musim setelah hujan, plafon lembab, sedikit demi sedikit lapuk dan runtuh. Kondisi ini tentu bisa membahayakan warga sekolah yang setiap saat menggunakan fasilitas gedung-gedung tersebut. Kondisi gedung-gedung yang lain juga terlihat kurang terawat.

Meski demikian, aktivitas pembelajaran di sekolah tersebut berlangsung dengan baik. Seluruh peserta didik yang saat ini berjumlah 150 siswa terdiri dari kelas 10, 11, dan 12 tinggal di asrama putra dan putri. Sebagian guru juga tinggal di asrama guru yang lokasinya bersebelahan dengan asrama putri. Peserta didik SMKN UT

beasal dari kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung.

Konsep awal sekolah ini memang dibiayai secara bersama (*sharing*), antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota yang mengirimkan peserta didik lulusan SMP untuk sekolah di SMKN UT dengan beasiswa. Angkatan pertama, semua kabupaten dan kota di Lampung mengirim siswa dengan beasiswa ke sekolah tersebut. Namun, sampai angkatan kelima saat ini, semakin sedikit pemerintah kabupaten dan kota yang berpartisipasi dengan mengirim lulusan SMP untuk melanjutkan ke SMKN UT. Mayoritas peserta didik di sekolah tersebut sekarang berasal dari Lampung Tengah, disamping sebagian kecil berasal dari kabupaten lain.

E. Kondisi Pembelajaran

SMKN UT sudah menerapkan Kurikulum 2013. Tahun pelajaran 2018 ini, SMKN UT berencana membuka dua jurusan baru jalur berbiaya (*nonbeasiswa*), yaitu kompetensi keahlian Agribisnis Ternak Ruminansia dan Teknik Kendaraan Ringan (*otomotif*). Pembukaan dua jurusan baru tersebut didasarkan pada analisis pengelola sekolah, terkait prospek dan keterkaitan pengembangan jurusan yang telah ada. Agribisnis ternak selain untuk mendukung pengembangan Teknik Energi Biomassa, sebagai penghasil bahan baku (kotoran ternak) biomassa, juga diarahkan untuk pemanfaatan potensi lahan dan pakan yang masih cukup tersedia di kawasan sekolah. Sedangkan kompetensi teknik kendaraan ringan (*otomotif*) menimbang kebutuhan akan keahlian tersebut sebagai penyedia tenaga kerja dan keterampilan kerja mandiri (*perbengkelan*).

Sarana dan prasarana fisik sekolah yang sudah relatif memadai di SMKN UT belum didukung perangkat pendidikan lain secara optimal, sehingga hasil yang diharapkan belum sesuai harapan. Tenaga guru, misalnya, saat ini terdapat 25 tenaga guru yang semua masih berstatus honorer diangkat dengan Surat Keputusan kepala

sekolah; seluruhnya sarjana (S-1). Hanya satu guru berstatus PNS, yaitu kepala sekolah sendiri. Selain itu, terdapat 25 tenaga kependidikan juga dengan status honorer, meliputi tenaga administrasi, satpam, dan tenaga kebersihan. Kondisi guru dan tenaga kependidikan yang mayoritas berstatus honorer ini terjadi juga di hampir semua unit sekolah menengah baru di Provinsi Lampung.

Bidang keahlian yang dikembangkan di SMKN UT juga belum ditunjang dengan perangkat praktek dan laboratorium yang memadai. Peralatan dan bahan-bahan laboratorium tidak cukup tersedia. Mesin-mesin dan alat-alat praktik yang ada pun sudah ketinggalan zaman (*out of date*). Ini menyebabkan keterampilan yang dimiliki lulusannya menjadi tidak relevan atau tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi di dunia kerja yang sesungguhnya.

Laboratorium teknik energi biomassa, misalnya, tidak dilengkapi mesin dan peralatan yang representatif untuk bisa mengembangkan sumber energi biomassa dengan nilai ekonomi yang efisien. Juga, bengkel (*workshop*) teknik pengolahan hasil pertanian tidak ditunjang perangkat pengolahan hasil-hasil pertanian yang lengkap. Kondisi ini menyebabkan proses pembelajaran di SMKN UT menjadi tidak unggul, karena sarana-prasarana yang unggul yang dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajarannya tidak tersedia. Pembangunan gedung-gedung yang representatif, belum diimbangi penyediaan perangkat pembelajaran yang juga representatif.

F. Delapan Standar Pendidikan

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang dimaksud Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Indonesia. Evaluasi capaian SNP di setiap satuan pendidikan

dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. Implementasinya pada tingkat provinsi dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah. Dalam peraturan pemerintah tersebut, SNP terdiri dari delapan standar, yaitu: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

Hasil penilaian akreditasi SMKN UT yang dilaksanakan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/ Madrasah pada akhir 2017 lalu, dengan komponen penilaian mencakup delapan SNP, menunjukkan bahwa nilai akhir SMKN UT Anak Tuha masih dalam predikat “Baik” dengan skor 83 (dalam rentang nilai $81 \leq$ nilai akhir ≤ 90). Belum mampu mencapai predikat “Unggul” (rentang nilai $91 \leq$ nilai akhir ≤ 100).

Tabel 1. Nilai Akreditasi SMKN UT Anak Tuha

No.	Komponen	Nilai	Subjek Utama
1.	Standar Isi	87	Sekolah
2.	Standar Proses	75	Sekolah
3.	Standar Kompetensi Lulusan	89	Sekolah
4.	Standar Pendidik & Tenaga Kependidikan	75	Dinas
5.	Standar Sarana dan Prasarana	89	Dinas
6.	Standar Pengelolaan	79	Dinas + Sekolah
7.	Standar Pembiayaan	83	Dinas
8.	Standar Penilaian Pendidikan	84	Sekolah
	Nilai Akhir	83	SMKN UT

Sumber: Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah, 2017 (*diolah*)

Dari delapan indikator standar nasional pendidikan tersebut, nilai terendah SMKN UT Anak Tuha adalah pada standar proses dan standar pendidik dan tenaga

kependidikan dengan skor masing-masing 75 (predikat “cukup”). Nilai tertinggi pada standar kompetensi lulusan dan standar sarana dan prasarana (89). Hasil penilaian tersebut menunjukkan, bahwa standar proses terkait pelaksanaan pembelajaran belum berjalan secara optimal. Hal ini tentu berhubungan erat dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan yang juga masih rendah, yang mengindikasikan tingkat kelayakan guru dan tenaga kependidikan yang ada masih harus ditingkatkan lagi.

Capaian nilai tertinggi pada kompetensi lulusan menunjukkan bahwa kualifikasi kemampuan lulusan SMKN UT yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan relatif baik. Hal ini merupakan hasil dari *boarding school system* yang diterapkan di SMKN UT, dimana terjadi integrasi antara pendidikan akademik, keterampilan (vokasi), dan pendidikan karakter, sehingga menghasilkan lulusan yang baik dari aspek akademik dan nonakademik. Peserta didik yang diasramakan relatif lebih terjaga dan terarah dalam aspek pergaulan dan aktivitas keseharian. Pendidikan karakter lebih mudah ditanamkan dan dikondisikan melalui sistem pendidikan *boarding school* ini.

Nilai baik juga diperoleh pada standar sarana dan prasarana, yang mencakup kriteria ruang belajar, tempat berolah raga, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. SMKN UT memang relatif unggul dalam infrastruktur fisiknya. Kelengkapan gedung dan bangunan relatif lebih baik dibanding sekolah lain. Namun, ketersediaan ini perlu ditingkatkan dalam hal kemanfaatannya. Gedung dan bangunan yang ada belum semua termanfaatkan dan terawat dengan baik,

karena belum didukung kemampuan/dukungan pendanaan.

Tentu saja, dari delapan standar pendidikan tersebut, tidak semua ada dalam kewenangan satuan pendidikan. Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung sangat menentukan, khususnya dalam penguatan standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Hasil penilaian Badan Akreditasi Provinsi tersebut menunjukkan standar pendidik dan tenaga kependidikan masih rendah, dan semua standar yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum ada yang mencapai peringkat “Unggul.”

Begitu juga pada standar pendidikan yang sangat ditentukan kinerja pengelola satuan pendidikan itu sendiri, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan yang berada dalam pengelolaan penuh satuan pendidikan, juga belum sampai pada peringkat “unggul.” Oleh karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung bersama dengan pengelola SMKN UT, harus menyamakan persepsi bagaimana kelanjutan pengelolaan sekolah ini, dalam rangka mencapai predikat “unggul” dengan pemenuhan 8 SNP secara paripurna.

Reorientasi SMKN UT menjadi satu kebutuhan. Predikat “unggul-terpadu” perlu diterjemahkan dengan indikator yang lebih jelas dan target capaian dalam jangka waktu tertentu. Ini perlu dibangun dan disepakati bersama, khususnya secara teknis antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan pengelola sekolah. Termasuk dengan para pemangku kepentingan lain yang menginisiasi berdirinya sekolah unggul-terpadu tersebut. Pemerintah Provinsi Lampung dan BPPT perlu duduk kembali membahas “nasib” sekolah tersebut. Pelibatan pemerintah kabupaten dan kota, juga perlu dibangun kembali, khususnya Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

Komitmen yang dulu dibangun bersama dalam membuka bidang keahlian di sekolah tersebut perlu diperkuat kembali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Tinjauan dan Kebijakan*

Hingga saat ini visi ideal pendirian SMKN Unggul Terpadu belum terlihat tercapai secara optimal. Predikat “unggul terpadu” belum mampu diterjemahkan dan ditampilkan dalam kinerja, antara lain, berupa luaran (lulusan) serta hasil (kompetensi) yang tinggi yang layak dibanggakan oleh warga Provinsi Lampung. Banyaknya anggaran yang telah digelontorkan untuk membangun infrastruktur fisik di lokasi yang rencananya akan menjadi kawasan pendidikan terpadu tersebut, belum seimbang dengan hasil yang dicapai saat ini. Hal tersebut tentu menjadi catatan penting dalam evaluasi keberadaan satuan pendidikan yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Lampung tersebut.

Dari hasil diskusi terfokus dengan para pemangku kepentingan di SMKN UT, semua pemangku kepentingan masih memiliki harapan yang tinggi terhadap sekolah tersebut. Dalam diskusi yang dilasakana pada 15 Mei 2018 di SMKN UT, yang melibatkan unsur Komite Sekolah, Dewan Pendidikan Lampung Tengah, pihak B2TP-BPPT, alumni SMKN UT, peserta didik, guru dan tenaga kependidikan, serta kepala sekolah, semua masih memberikan harapan sekolah tersebut dapat tetap eksis dan meningkat prestasinya. Mereka semua menyayangkan, apabila Pemerintah Provinsi Lampung sampai “mundur” dalam pengelolaan SMKN UT tersebut. Bahkan, dengan dialihkannya kewenangan pengelolaan pendidikan menengah kepada pemerintah provinsi—sesuai amanah UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah—Pemerintah Provinsi Lampung diharapkan

lebih optimal dalam meningkatkan mutu atau revitalisasi SMKN UT tersebut.

SMKN UT yang menerapkan *boarding school system* ini perlu mendapatkan perhatian dan pengelolaan khusus dari pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Perhatian khusus ini tidak hanya terkait anggaran, melainkan juga penguatan manajemen sekolah, serta dukungan fasilitasi agar sekolah ini memiliki jejaring yang luas dengan lembaga-lembaga lain terkait pengembangan kompetensi juga dengan dunia usaha dan industri yang akan menyerap lulusannya. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memfasilitasi peningkatan kapasitas pengelola sekolah dan manajemen yang profesional. Hal terakhir ini membutuhkan adanya kebijakan sumber daya manusia terkait pengangkatan kepala sekolah, pengelolaan guru dan tenaga kependidikan, yang menunjang dan selaras dengan visi sekolah unggul terpadu.

Kompetensi sumber daya manusia pengelola sekolah tersebut dibutuhkan, untuk efektivitas pencapaian tujuan pendiriannya. Sistem *boarding school* dimana para peserta didik diasramakan, sangat efektif untuk mendukung pengembangan pendidikan karakter di sana; sebagai pusat pembinaan karakter generasi muda di Provinsi Lampung. Dengan sistem asrama, pendidikan karakter berupa pengamalan nilai-nilai agama, kemandirian, akhlak, perilaku, kedisiplinan, serta karakter unggul lainnya akan lebih mudah ditumbuhkembangkan. Siswa yang diasramakan juga harus dibekali keterampilan hidup (*life skill*) yang lebih baik, seperti kemampuan berbahasa asing (Inggris, Arab, Tionghoa, dll) atau kewirausahaan.

B. Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan metode perencanaan strategis yang dipergunakan untuk memahami faktor kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*),

peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) terhadap suatu organisasi. Analisis ini sering dipergunakan sebagai bagian dari proses perencanaan strategis, dalam rangka meningkatkan kinerja atau produktifitas suatu organisasi.

Tahap pertama analisis ini adalah dengan mengidentifikasi faktor kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman dalam satu organisasi. Dalam analisa SWOT, informasi dikumpulkan dan dianalisa, dan hasil analisa dapat menjadi rujukan dalam merumuskan misi, tujuan, kebijaksanaan, atau strategi yang sedang dan akan dilaksanakan. Hasil interaksi antarfaktor internal (kekuatan dan kelemahan), dengan faktor eksternal (peluang dan tantangan) akan melahirkan strategi organisasi berdasarkan faktor tersebut.

Hasil evaluasi terhadap SMKN Unggul Terpadu, dapat diidentifikasi faktor kekuatan (*Strengths*) yang ada di satuan pendidikan tersebut adalah: ketersediaan lahan yang luas, bangunan yang relatif memadai, didukung beasiswa, BOS (dan BOSDA), menerapkan sistem *boarding school*, serta kompetensi keahlian strategis yang tidak banyak dimiliki SMK lain di Indonesia.

Sementara itu, kelemahan (*Weaknes*) internal SMKN UT adalah: status lahan belum bersertifikat hak milik (masih menginduk ke BPPT), lokasi jauh dari pusat kota, akses jalan ke sekolah (selalu) dalam kondisi rusak, peralatan praktek dan laboratorium belum memadai, kebutuhan biaya perawatan yang besar yang membuat tidak semua gedung terawat dengan baik, serta masih mengandalkan sumber dana pemerintah (beasiswa, BOS, BOSDA). Faktor kelemahan lainnya adalah semua guru dan tenaga kependidikan masih berstatus honorer murni. Hanya satu PNS, yaitu kepala sekolah. Kemudian, jaringan dengan DUDI belum terbangun secara optimal, kurang sosialisasi dan promosi sekolah, prestasinya masih belum cukup

membanggakan, serta manajemen sekolah masih biasa saja, atau belum “unggul.”

Faktor eksternal berupa peluang (*opportunities*) juga penting dicermati pengelola SMKN UT. Peluang tersebut adalah: Pendidikan vokasi saat ini semakin diminati, lokasi yang jauh tidak menjadi masalah dengan *boarding school system* dimana peserta didik diasramakan, teknologi informasi dan media sosial sebagai sarana sosialisasi dan promosi cukup tersedia, prospek lapangan kerja dan pendidikan tinggi terbuka bagi lulusannya, integrasi/sinergi dengan lembaga lain, seperti technopark, B2TP-BPPT, serta kebutuhan sumber energi baru dan terbarukan yang semakin mendesak dengan ancaman krisis energi secara global.

Adapun faktor eksternal SMKN UT yang menjadi ancaman (*Threats*) adalah: Semakin banyak alternatif lembaga pendidikan menengah negeri dan swasta di Provinsi Lampung yang memiliki keunggulan masing-masing. Di samping juga, komitmen dan konsistensi para pemangku kepentingan terhadap keberlanjutan SMKN UT.

Berdasarkan identifikasi faktor internal dan eksternal SMKN UT tersebut, dapat dirumuskan strategi memaksimalkan kekuatan (S) untuk menghadapi tantangan (T) dengan strategi mengoptimalkan peran orang tua siswa dan dunia usaha dan industri (DUDI) dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Strategi lain adalah sekolah harus mampu meningkatkan keunggulan dan kompetensinya, sekaligus meningkatkan prestasi baik akademik maupun nonakademik.

Strategi optimalisasi kekuatan (S) untuk meraih kesempatan atau peluang (O) dapat dilakukan dengan meningkatkan kerja sama dengan DUDI untuk penyerapan lulusan SMKN UT. Selain itu, pengelola SMKN UT juga penting untuk terus

menjalin dan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Warga SMKN UT juga ditantang untuk mampu memanfaatkan lahan yang tersedia di sana untuk kegiatan produktif dan menghasilkan produk bernilai ekonomi. Pengelola SMKN UT juga perlu membangun gerakan gotong royong antara siswa, orang tua siswa, alumni dalam upaya memelihara infrastruktur sekolah secara lebih baik.

Strategi mengatasi kelemahan (W) untuk meraih peluang dan kesempatan (O) dapat dilakukan dengan cara memperjelas status lahan, mengoptimalkan peran Komite Sekolah dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar, meningkatkan kapasitas alat praktek dan laboratorium, meningkatkan sosialisasi dan promosi sekolah dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang tersedia, mengembangkan unit bisnis (koperasi) sekolah untuk pemasaran hasil-hasil produksi, penguatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan, serta penerapan standar pelayanan minimal satuan pendidikan.

Kelemahan (W) internal harus mampu diminimalisir atau dihilangkan untuk bisa bertahan dari ancaman (T) faktor luar. Strategi yang dapat diambil adalah mengoptimalkan pemanfaatan bangunan/gedung yang sudah ada, meningkatkan kapasitas manajemen sekolah, optimalisasi implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), berupaya membangun (citra) sekolah yang *excellent* dan layak dibanggakan di Provinsi Lampung, serta memperbanyak difusi (penyebarluasan) teknologi maupun produk-produk yang dihasilkan di SMKN UT. Selengkapnya hasil analisis SWOT SMKN UT ditampilkan dalam Tabel 2.

Tabel 2 Analisis SWOT SMKN Unggul Terpadu

<p>Internal / Eksternal</p>	<p><u>Opportunities</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Minat masuk SMK tinggi - Dukungan TIK - Lapangan kerja terbuka - Sinergi antarlembaga - Anggaran pendidikan 20% - Kebutuhan sumber energy baru dan terbarukan 	<p><u>Threats</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Semakin banyak alternatif SMA/SMK negeri dan swasta - Komitmen - Konsistensi
<p><u>Strengths</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Lahan luas - Bangunan memadai - Beasiswa (BOSDa) - <i>Boarding school system</i> - Bidang kompetensi keahlian strategis. 	<p>Strategi SO</p> <p><i>Optimalisasi S untuk meraih O, dengan strategi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kerja sama dengan DUDI untuk penyerapan lulusan • Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota • Meningkatkan pemanfaatan lahan untuk produksi • Membangun gerakan gotong royong antara siswa, orang tua siswa, alumni untuk memelihara infrastruktur sekolah • Penataan manajemen. 	<p>Strategi ST</p> <p><i>Maksimalisasi S menghadapi T, dengan strategi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi peran orang tua siswa dan DUDI dalam peningkatan mutu pembelajaran. • Meningkatkan keunggulan kompetensi • Meningkatkan keunggulan dan prestasi.
<p><u>Weaknesses</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Status lahan - Akses jalan rusak - Alat praktek dan lab masih minim - Biaya perawatan besar - Sumber dana terbatas - Semua GTK honorer - Jaringan dg DUDI - Sosialisasi & promosi - Prestasi belum tinggi - Majemen sekolah 	<p>Strategi WO</p> <p><i>Mengatasi W untuk meraih O dengan strategi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperjelas status lahan • Mengoptimalkan peran Komite Sekolah • Meningkatkan kapasitas alat praktek dan laboratorium • Meningkatkan sosialisasi dan promosi sekolah dengan memanfaatkan TIK • Mengembangkan unit bisnis (koperasi) sekolah untuk pemasaran hasil produksi • Penguatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan • Penerapan standar pelayanan minimal satuan pendidikan. 	<p>Strategi WT</p> <p><i>Meminimalisasi W untuk bertahan dari T dengan strategi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan pemanfaatan bangunan yang sudah ada. • Meningkatkan kapasitas manajemen sekolah • Optimalisasi MBS • Membangun (citra) sekolah yang <i>excellent</i> dan layak dibanggakan di Provinsi Lampung • Memperbanyak difusi produk yang dihasilkan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Pembangunan infrastruktur dan fasilitas SMKN Unggul Terpadu di Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, yang telah menyerap anggaran cukup besar perlu dioptimalkan pemanfaatannya. Sekolah yang dicita-citakan menjadi unggulan Provinsi Lampung dalam mengembangkan pendidikan vokasi yang layak dibanggakan—dengan kompetensi keahlian pengembangan sumber energi baru dan terbarukan yang menjadi kebutuhan global—diharapkan oleh para pemangku kepentingan, dapat diteruskan dan ditingkatkan pengelolannya, agar lebih efektif dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Fasilitas fisik berupa gedung dan bangunan yang tersedia dinilai cukup memadai untuk mewujudkan harapan tersebut. Dukungan dalam bentuk penguatan manajemen sekolah (manajemen pembelajaran dan manajemen keuangan), penguatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan, serta kelengkapan alat praktik bagi peserta didik, merupakan kebutuhan mendesak sekolah.

Predikat “unggul terpadu” juga masih relevan untuk dipertahankan dan diwujudkan, mempertimbangkan Provinsi Lampung memiliki potensi yang besar untuk mendukung serta mewujudkan predikat tersebut, khususnya dalam mengembangkan alternatif sumber energi baru dan terbarukan berbasis biomassa, selain pengembangan potensi agroindustri. Keberhasilan dalam pengembangan pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan nasional dan global, serta berbasis pada potensi daerah, akan menjadi keunggulan dan meningkatkan daya saing daerah. Harapan ini tentu tidak bisa diwujudkan secara instan atau dalam tempo singkat. Diperlukan komitmen dan konsistensi semua pihak, untuk mendorong lahirkan pendidikan vokasi yang layak dibanggakan di Provinsi Lampung yang

kaya dengan sumber daya alam ini. Sumber daya alam yang ada akan lebih baik jika mampu dikelola oleh putra-putri daerah sendiri.

SMKN UT yang menerapkan *boarding school system* ini perlu mendapatkan perhatian lebih dan pengelolaan khusus dari pemerintah daerah. Tidak hanya terkait alokasi anggaran, tetapi juga kebijakan SDM khususnya penguatan guru dan tenaga kependidikan, serta fasilitas agar sekolah ini memiliki jejaring yang luas dengan lembaga-lembaga lain terkait pengembangan kompetensi juga dengan dunia usaha dan industri yang akan menyerap lulusannya. Kebijakan sumber daya manusia ini penting, karena satuan pendidikan akan maju dan berkembang dengan kapasitas manajerial yang mumpuni, didukung guru dan tenaga kependidikan yang kapabel.

Kompetensi sumber daya manusia pengelola sekolah tersebut dibutuhkan untuk efektivitas pencapaian tujuan pendiriannya. Sistem *boarding school* dimana para peserta didik diasramakan, sangat efektif untuk mendukung pengembangan pendidikan karakter di sana; sebagai pusat pembinaan karakter generasi muda di Provinsi Lampung. Dengan sistem asrama, pendidikan karakter berupa pengamalan nilai-nilai agama, kemandirian, akhlak perilaku, kedisiplinan, dan karakter unggul lainnya lebih mudah ditumbuhkan. Siswa yang diasramakan juga perlu diberikan tambahan keterampilan hidup (*life skill*), seperti kemampuan berbahasa asing (Inggris, Arab, Tionghoa, dll) atau kewirausahaan.

B. Rekomendasi

1. Berdasarkan kesimpulan diatas, direkomendasikan alternatif kebijakan yang dapat diambil Pemerintah Provinsi Lampung, yaitu:
2. Memperkuat kebijakan pengelolaan SMKN UT untuk menjadi sekolah yang benar-benar unggul terpadu, melalui: kebijakan sumber daya manusia

terutama penyediaan guru dan tenaga kependidikan yang mumpuni; seleksi dan pengangkatan kepala sekolah; penguatan manajemen sekolah dengan mengoptimalkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME); penataan manajemen keuangan; dukungan sarana-prasarana praktik dan laboratorium; serta mendorong pemecahan status lahan yang masih menyatu dengan BPPT.

3. Memperkuat integrasi kebijakan pengelolaan potensi sumber daya alam daerah dengan dinas terkait—seperti Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pekerjaan Umum, dll—dimana SMKN UT diarahkan untuk mendukung pengolahan sumber daya alam dalam aspek penyediaan tenaga trampil yang kompeten dengan fasilitas *workshop* serta laboratorium yang memadai. SMK UT bisa didorong menjadi pusat pengolahan dan peningkatan nilai tambah komoditi unggulan yang ada di Provinsi Lampung.
4. Memperkuat tata kelola SMKN UT dengan memberikan keleluasaan dan ruang yang cukup bagi pengelola satuan pendidikan, untuk menggunakan sumber daya yang ada (anggaran) dalam rangka mengembangkan kapasitas sekolah dan memberikan layanan pendidikan yang bermutu bagi masyarakat. Revitalisasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dibutuhkan di SMKN UT, dalam rangka memperkuat kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas, dengan kualitas manajemen yang mumpuni.
5. Reorientasi SMKN UT, dengan melihatkan para pemangku kepentingan, khususnya para pihak yang terlibat dalam pendirian sekolah tersebut. Pemerintah Provinsi Lampung, BPPT, dan pemerintah kabupaten/kota bisa

duduk bersama membahas kembali tentang keberlanjutan SMKN UT.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas Sudijono. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Penerbit PT RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2007.
- Dadang Suhardan, dkk. *Manajemen Pendidikan*. Alfabeta. Bandung, 2011.
- Eru Wibowo. *Efektivitas Manajemen Berbasis Sekolah dalam Pelaksanaan Pendidikan*. Diambil dari Jurnal Ilmiah PDF online.
- Michael Moran, Martin Rein, Robert E. Goodin. *Handbook Kebijakan Publik*. Penerjemah Imam Baehaqie. Penerbit Nusa Media. Bandung, 2015.
- Mudjiono Dimiyati. *Belajar dan Pembelajaran*. Kerjasama Depdikbud dan PT Rineka Cipta. Jakarta, 2006.
- Rusman, Dr., M.Pd. *Model-Model Pembelajaran; Mengembangkan Profesionalisme Guru*. Edisi Kedua. Penerbit Rajagrafindo Persada. Jakarta, 2012.
- Suharsimi Arikunto. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- Stephen R. Covey. *The 3rd Alternative*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2012.
- <http://nurmaherawatifaisal.wordpress.com/2013/10/23/tugas-pokok-dan-fungsi-pengawas-sekolah/>
- <http://hafidzf.wordpress.com/2009/06/16/pengertian-monitoring-dan-evaluasi/>
- <http://ninukdwiwuriyani.blogspot.com/2010/01/standar-pengelolaan-pendidikan.html>

Halaman Kosong